

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Penerapan prinsip transparansi pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang dianalisis berdasarkan tiga indikator dari transparansi yang mencakup ; informatif, keterbukaan informasi, dan prosedur pelayanan yang mudah dipahami oleh masyarakat, sudah cukup optimal dalam pelaksanaannya namun belum dapat dikatakan maksimal untuk memenuhi prinsip transparansi. Hasil analisis dari ketiga indikator tersebut akan dijabarkan sebagai berikut :

1) Informatif

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mampu untuk dapat memberikan informasi data dan prosedur kepada masyarakat dan para pemohon informasi secara tepat waktu, lengkap, dan akurat. Setiap permohonan informasi dapat terselesaikan secara tepat waktu, informasi mudah untuk dipahami dan jelas, serta Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah selalu melakukan

peninjauan ulang untuk menjamin keakuratan informasi. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditemukan bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sudah informatif dalam melakukan pelayanan publik.

2) Keterbukaan Informasi

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mampu untuk dapat memberikan kesempatan yang sama terhadap seluruh masyarakat untuk dapat dengan mudah mengakses informasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan berbagai media yang ada, seperti telah tersedianya Website Resmi, Instagram, Twitter, dan Youtube yang kerap menjadi saluran keterbukaan informasi kepada masyarakat. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah kerap melakukan sosialisasi di daerah-daerah khususnya daerah terpencil mengenai tata cara alur permohonan informasi, namun tidak rutin dilakukan karena keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia. Terkait pengaduan dari masyarakat, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah cepat tanggap dalam merespon dan terpublikasi pada website resmi. Terdapat kendala pada indikator ini, yaitu kurangnya informasi yang spesifik pada website resmi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah karena kurangnya Sumber Daya Manusia pada bidang IT, serta kurangnya komitmen pegawai terhadap aksesibilitas informasi atas permintaan masyarakat. Dari

penelitian yang telah dilakukan, dapat ditemukan bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah belum cukup optimal dalam melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

3) Prosedur Pelayanan yang Mudah Dipahami oleh Masyarakat

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mampu untuk memberikan prosedur pelayanan yang mudah dipahami oleh masyarakat, seperti tersedianya tata cara alur pelayanan publik yang baik pada kantor KIP Jawa Tengah & website resmi, tersedianya alur pelayanan publik bagi disabilitas, serta kerap melakukan edukasi sosialisasi kepada masyarakat. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah saat ini sedang berupaya untuk menyederhanakan prosedur pelayanan publik dengan membuat aplikasi digital, namun dalam pelaksanaannya belum maksimal dan terdapat kendala akibat dari kurangnya anggaran dari Komisi Informasi Pusat dan APBD Jawa Tengah. Susunan kepengurusan pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah juga tidak maksimal karena masih terdapat cukup banyak rangkap jabatan atau kekurangan tenaga pekerja, yang diakibatkan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditemukan bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah belum cukup optimal dalam memberikan prosedur pelayanan yang baik dan mudah dipahami oleh masyarakat.

2. Faktor-faktor yang berkontribusi pada penerapan prinsip transparansi pada pelayanan publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat yang terklasifikasi sebagai berikut :

1) Faktor Pendorong, adanya evaluasi rutin yang dilakukan oleh pegawai terhadap segala sistem dan peraturan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan publik, adanya perkembangan teknologi yang mengikuti zaman seperti ketersediaan website dan media sosial sebagai pendukung keterbukaan publik, serta ketersediaan panduan dan prosedur pelayanan publik yang tidak rumit dan mudah dipahami oleh masyarakat sebagai pedoman informatif.

2) Faktor Penghambat, adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada pada kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sehingga menimbulkan banyaknya rangkap jabatan yang berakibat pada tidak maksimalnya pelaksanaan program-program pendukung keterbukaan informasi publik. Terdapat pula keterbatasan jumlah anggaran dari Komisi Informasi Pusat maupun APBD Jawa Tengah, yang kurang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi. Adanya keterbatasan anggaran ini juga memicu permasalahan lainnya seperti kurangnya sarana dan prasana yang

baik untuk pengembangan aplikasi dan kegiatan keterbukaan publik lainnya. Terdapat pula kurangnya komitmen pegawai pada badan publik akibat dari tidak mematuhi prinsip aksesibilitas informasi kepada masyarakat yang meminta informasi.

3. Upaya dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada adalah dengan rutin mengikuti pelatihan kompetensi pegawai yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Jawa Tengah, serta turut bekerjasama dengan dinas-dinas terkait di Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat menjalankan program-program keterbukaan publik untuk mengelola anggaran yang terbatas.

4.2 SARAN

Berdasarkan penelitian ini, beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan untuk mengoptimalkan penerapan prinsip transparansi pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan anggaran yang ada dapat dioptimalkan dengan melakukan kerjasama antar sektor, seperti instansi lain di Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan program-program keterbukaan informasi publik. Untuk memperkuat kerjasama antar sektor, dibutuhkan pendekatan yang lebih terstruktur dan berfokus pada penyatuan segala sumber daya serta keahlian

yang ada dari gabungan berbagai sektor tersebut. Pendekatan yang terstruktur dapat dilakukan dengan dibangunnya platform kolaborasi, yaitu berbentuk suatu forum yang dapat memfasilitasi pertemuan rutin antara berbagai pihak untuk membahas mengenai perkembangan program, hambatan yang ditemukan, dan solusi yang akan dicapai bersama. Hal ini harus diperkuat untuk menghasilkan suatu inovasi yang berperan positif bagi antar sektor, khususnya bagi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi keterbatasan anggaran yang ada. Kerjasama yang sinergis dan terfokus akan dapat mengurangi tantangan-tantangan yang ada, serta memastikan terlaksananya program keterbukaan informasi secara baik, efisien, inovatif, dan berkelanjutan.

2. Untuk dibentuknya koalisi antar Komisi Informasi Provinsi lainnya yang memiliki permasalahan serupa, untuk dapat mengajukan usulan kolektif mengenai kebutuhan anggaran yang mencukupi kepada pemerintah pusat.
3. Untuk permasalahan keterbatasan Sumber Daya Manusia, dapat dilakukan pengajuan terhadap pemerintah pusat terkait kurangnya Sumber Daya Manusia berkompeten yang ada pada kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Pengajuan ini dapat diperkuat dengan penyusunan kajian khusus atau *position paper* mengenai dampak kekurangan Sumber Daya Manusia dan anggaran terhadap keberjalanan pelayanan publik dan penerapan prinsip transparansi, mengingat bahwa Komisi Informasi

Provinsi Jawa Tengah merupakan suatu badan publik yang memiliki fungsi utama dalam hal keterbukaan informasi publik. Dapat disertakan pula data pendukung seperti data statistik dan studi kasus untuk memperkuat argumen untuk diajukan pada pemerintah pusat, agar dapat diselenggarakan rekrutmen pegawai baru untuk Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

4. Dapat melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan instansi atau lembaga lain untuk membantu penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Seperti menggandeng universitas atau lembaga riset, untuk dapat mendatangkan mahasiswa magang dari program studi yang relevan untuk membantu tugas-tugas tertentu terkait pelayanan publik pada kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.